

PENGARUH *RELIGIOUSITY* DAN LINGKUNGAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK ORANG PRIBADI DI SURABAYA

Ria Dewi Ambarwati

Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: riadewi@pknstan.ac.id

Nur Farida Liyana

Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: nurfaridaliyana@gmail.com/faridaliyana@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[03 02 2020]

Dinyatakan Diterima
[19 02 2020]

KATA KUNCI:

Kepatuhan pajak, *religiosity*, lingkungan, referent group, agama

KLASIFIKASI JEL:
E71

ABSTRAK

Religiosity and environmental influences (group references) are two things that are believed to have a positive influence on tax compliance. This has been proven by previous studies focusing on the determinants of tax compliance. For this reason, this study will conduct a survey of 300 individual taxpayers in Surabaya to see whether there is an influence of religiosity and environmental influence on a person's decision to comply with tax rules. For this reason, a regression analysis was conducted and it was found that there was a significant positive effect between the level of religiosity and the influence of the environment (referent group) on tax compliance. This means that the more religious a person is, the more chance he will obey the tax rules. Likewise, a person's chances of complying with taxes will increase if one's environment is also compliant with taxes. For this reason, DGT needs to collaborate with religious organizations, religious leaders and communities to be able to voice the importance of taxes and the need for compliance with tax regulations.

Kereligiusan seseorang dan pengaruh lingkungan (referensi kelompok) merupakan dua hal yang dipercaya memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini telah dibuktikan oleh penelitian-penelitian terdahulu yang berfokus kepada faktor penentu kepatuhan pajak. Untuk itu di penelitian ini akan dilakukan survey kepada 300 Wajib Pajak orang pribadi di Surabaya untuk melihat apakah ada pengaruh religiusitas dan pengaruh lingkungan kepada keputusan seseorang untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Untuk itu dilakukan analisis regresi dan diperoleh bahwa benar terdapat pengaruh positif signifikan antara tingkat religiusitas (*religiosity*) dan pengaruh lingkungan (*referent group*) terhadap kepatuhan pajak (*tax compliance*). Hal ini berarti semakin religious seseorang maka peluang dia untuk patuh terhadap aturan pajak semakin tinggi. Demikian pula bahwa peluang seseorang untuk patuh terhadap pajak akan meningkat jika lingkungan seseorang tersebut juga patuh terhadap pajak. Untuk itu DJP perlu untuk melakukan kerjasama dengan organisasi keagamaan, tokoh agama dan komunitas-komunitas untuk dapat menyuarakan pentingnya pajak dan perlunya kepatuhan terhadap aturan perpajakan.

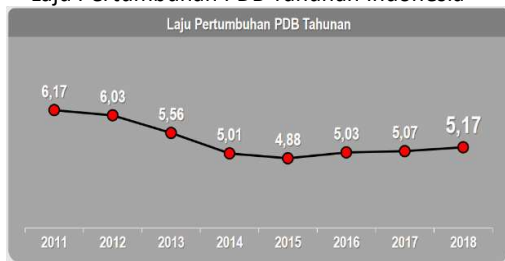
1. PENDAHULUAN

Perpajakan Indonesia pada dasarnya diamanatkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan kewajiban lainnya yang diberlakukan diperlukan untuk kebutuhan negara akan diatur oleh hukum. Selanjutnya definisi pajak itu sendiri dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 pasal 1 tahun 1983 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Disebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi kepada pemerintah yang bersifat wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang dan pembayar tidak akan mendapatkan manfaat secara langsung karena digunakan untuk tujuan pemerintah untuk memaksimalkan manfaat dan kesejahteraan warga negara.

Dalam hal sistem perpajakan, Indonesia melakukan dua jenis pajak berdasarkan otoritas yang bertanggung jawab memungut pajak. Kedua jenis pajak tersebut adalah Pajak Pusat dan Daerah. Pajak pusat diampu oleh DJP yang memiliki fungsi untuk mendanai anggaran nasional yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Properti dan Pajak Bea Materai. Selanjutnya, otoritas pajak daerah adalah pemerintah daerah memungut pajak digunakan untuk mendukung pengembangan pemerintah daerah yang contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak Parkir.

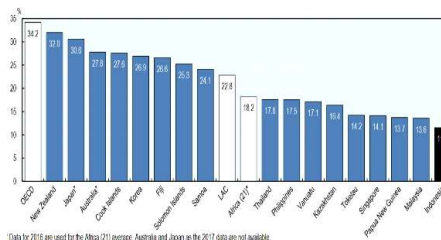
Sebagai anggota G-20, Indonesia telah menunjukkan potensi yang sangat baik untuk menjadi salah satu *emerging country*. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, yaitu 5% dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhir, Indonesia telah menjadi ekonomi terbesar kelima di Asia.

Gambar 1
Laju Pertumbuhan PDB Tahunan Indonesia



Pendapatan pajak memberikan kontribusi lebih dari 70% dari total pendapatan dan kontribusi ini telah meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun memiliki peran yang sangat penting bagi penerimaan negara, kinerja DJP yang dapat diukur melalui indikator *tax ratio*, belum optimal. Berdasarkan laporan dari OECD (2019) seperti yang terlihat dari Gambar 2, *tax ratio* Indonesia sebesar 11,5% pada tahun 2017 dan merupakan *tax ratio* terendah jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Pasifik.

Gambar 2. *Tax Ratio* Asia Pasifik 2017



Sumber: OECD (2019)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh McKinsey (2013), rendahnya *tax ratio* Indonesia disebabkan oleh ketergantungan DJP terhadap penerimaan yang berasal dari Wajib Pajak Badan. Berdasarkan Buku Saku Pajak Dalam Angka (2016) secara jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi mendominasi dengan lebih dari 90% dari total Wajib Pajak dan Wajib Pajak Badan berjumlah kurang dari 1%, namun secara penerimaan pajak, Wajib Pajak Badan menyumbang penerimaan 88,97% dari total penerimaan pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi hanya menyumbang sebesar 1,99%. Menurut Fues (2001), ketergantungan terhadap Wajib Pajak Badan sangat berbahaya bagi penerimaan pajak. Selain itu, dilihat dari kepatuhan pajak, kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan masih sekitar 60%.

Menurut Brown dan Mazur (2003), kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dengan cara yang berbeda berdasarkan kepatuhan pembayaran, kepatuhan penghitungan, dan kepatuhan pelaporan. Di lain pihak di Indonesia, DJP mengklasifikasikan kepatuhan menjadi dua terminologi umum yaitu kepatuhan administratif dan kepatuhan teknis. Kepatuhan administratif adalah situasi di mana Wajib Pajak mematuhi peraturan administrasi dalam hal menyampaikan pengembalian pajak dan membayar tepat waktu yang entah bagaimana mencakup persyaratan pelaporan, kepatuhan prosedural, atau kepatuhan terhadap peraturan. Di sisi lain, kepatuhan teknis muncul ketika pajak dihitung berdasarkan undang-undang perpajakan atau Wajib Pajak membayar bagian pajaknya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat ditentukan oleh bagaimana Wajib Pajak mengajukan pengembalian pajak mereka, membayar pajak mereka karena tanggal jatuh tempo, dan ketepatan pembayaran pajak (Brown dan Mazur, 2003). Keadilan adalah hal terpenting untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Ketika orang merasa bahwa mereka membayar pajak dalam sistem yang adil dibandingkan dengan orang lain, tingkat kepatuhan pajak akan meningkat. Dalam arti yang lebih luas, kepatuhan akan meningkat jika pemerintah memberikan layanan yang adil dan transparan yang akan memengaruhi keputusan warga negara untuk mematuhi aturan.

Bagaimana pemerintah memutuskan anggaran publik tampaknya berdampak pada tingkat kepatuhan. Alm, Jackson, dan McKee (1993) menemukan bahwa kepatuhan lebih tinggi ketika barang publik dipilih, daripada dipaksakan, dan ketika hasil politik diketahui didukung secara luas. Lebih lanjut, cara penentuan aturan juga dapat memengaruhi kepatuhan (Alm, McClelland, dan Schulze, 1999). Seperti diungkapkan oleh Liyana (2019) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak seseorang, diantaranya adalah peluang diperiksa dan adanya denda yang diterapkan oleh otoritas pajak.

Norma sosial dan moral telah dikutip sebagai alasan yang memengaruhi kepatuhan (Elster, 1989). Sementara itu kereligiusan seseorang terhadap aturan agama juga sangat memengaruhi seseorang untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Dampak agama pada bagaimana orang berperilaku adalah hal yang menarik. Agama memang membawa nilai-nilai baik bagi masyarakat. Oleh karena itu beberapa penelitian telah berusaha untuk mengungkapkan dampak signifikan dari religiusitas pada perilaku kepatuhan pajak. Torgler (2003) melakukan penelitian dengan menggunakan *World Values Survey* 1995-1997 termasuk faktor penentu religiusitas (menghadiri gereja, pendidikan agama dan menjadi anggota kelompok agama). Hasilnya menemukan bahwa semakin tinggi religiusitas orang semakin tinggi moral pajak dan ini meningkatkan perilaku kepatuhan pajak. Penelitian saat ini di Malaysia dilakukan oleh Mohd Ali (2013). Dia menemukan bahwa agama yang berbeda memberikan dampak berbeda pada bagaimana orang berperilaku terhadap perpajakan. Namun agama secara statistik memiliki signifikansi pada kesediaan untuk patuh.

Ketika orang menjadi lebih religius, mereka cenderung memiliki kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Berdasarkan temuan ini, kami menemukan hasil yang sama dalam penelitian yang dilakukan oleh Rajagukguk dan Sulistianti (2011) yang membahas efek religiusitas pada kepatuhan hukum dan pajak di Kota Bandung Indonesia. Mereka mengungkapkan bahwa ada dampak positif antara religiusitas dan kepatuhan pajak. Akhirnya, Riahi-Belkaoui (2004) menyarankan bahwa religiusitas harus ditangani sebagai masalah dalam penelitian masa depan oleh pembuat kebijakan pajak untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang kepatuhan pajak.

Selain itu, bagaimana orang membuat keputusan terkadang dipengaruhi oleh pengalaman keluarga atau teman mereka. Kami menyebut kelompok orang tersebut sebagai rujukan. Menurut Allingham dan Sandmo (1972), penggelapan pajak telah dipengaruhi oleh anggota keluarga atau teman. Mendukung saran Allingham dan Sandmo (1972), Schmolders (1959) mengungkapkan bahwa kemurahan hati keluarga dan anggota klub

memengaruhi pola pikir orang mengenai perilaku aturan perpajakan. Nilai orang-orang di lingkaran Wajib Pajak telah membawa pengaruh pada sikap Wajib Pajak. Apakah keluarga atau teman dekat mereka berperilaku menentang perpajakan berdampak pada persepsi mereka tentang penghindaran pajak. Dalam hal ini, jika mereka tahu bahwa keluarga atau teman mereka menghindari pajak, mereka cenderung untuk mengikuti tindakan mereka terhadap peraturan juga. Dampak signifikan dari kelompok referensi ini pada penggelapan pajak juga telah ditemukan oleh Clotfelter (1983).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pada penelitian ini, akan berfokus pada apakah religiusitas dan lingkungan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya akan mempengaruhi kepatuhan pajak mereka.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data survey terhadap 300 Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya pada tahun 2014. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis regresi dengan variable terikat adalah kepatuhan pajak dan [Waktu penelitian belum diungkapkan] variable bebasnya adalah religiusitas Wajib Pajak dan pengetahuan pajak Wajib Pajak dimaksud.

Pertanyaan ditanyakan dalam skala likert yaitu 1-5 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1 Sangat tidak setuju
- 2 Tidak setuju
- 3 Tidak yakin
- 4 Setuju
- 5 Sangat Setuju

Untuk pertanyaan tentang religiusitas adalah sebagai berikut:

1. Saya merasa agama sangat penting dan karenanya saya menjadi Wajib Pajak yang jujur
2. Saya sering ke rumah ibadah dan mengikuti kegiatan keagamaan, hal tersebut membuat saya menjadi pribadi yang jujur dan patuh pada aturan
3. Saya orang yang religius

Sementara untuk pertanyaan pengaruh lingkungan (*referent group*) adalah sebagai berikut:

1. Teman saya yang tidak patuh tidak pernah dikenakan denda
2. Orang tua saya yang tidak patuh tidak pernah dikenakan denda
3. Keluarga saya yang tidak patuh tidak pernah dikenakan denda

Sementara untuk pengukuran kepatuhan pajak responden diberikan soal cerita dan diminta untuk melakukan penilaian dengan skala 1-5. Soal cerita yang ditanyakan ada dalam lampiran 1

Sehingga model regresi yang dibangun adalah sebagai berikut:

$$TC = \beta_0 + \beta_1 RELIGIOSITY + \beta_2 REFGROUP + e$$

Dimana;

TC = Tax compliance behavior (Kepatuhan Pajak)

RELIGIOSITY= religiusitas Wajib Pajak

REFGROUP= referensi kelompok (lingkungan)

3. HASIL PENELITIAN

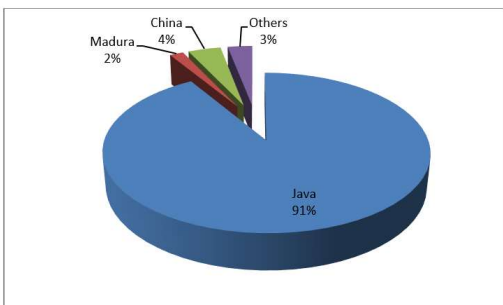
3.1 Statistik Deskriptif

Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi dan salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur. Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia dengan populasi 3,2 juta orang. Ini telah menjadi pusat perdagangan, bisnis, industri dan pendidikan di Jawa Timur. Dalam hal administrasi pemerintahan, terbagi menjadi lima wilayah dengan 31 kecamatan.

Surabaya, serta banyak kota lain di Indonesia, adalah kota multi-etnis. Jawa, Madura, Sunda, Bali, Cina, Arab, dan India adalah etnis utama di Surabaya. Seiring dengan Bahasa sebagai bahasa nasional, orang Surabaya berkomunikasi dalam bahasa Jawa.

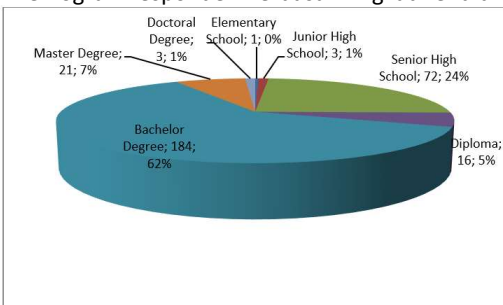
Berdasarkan data yang diperoleh pada saat survey, dari 300 responden, 91% adalah suku Jawa, 4 China, 2% Madura dan 3% dari suku lain.

Gambar 3
Demografi Responden Berdasar Suku Bangsa



Sementara itu jika dilihat dari jenis Pendidikan, 1% lulusan SMP, 24% lulus SMA, 5% lulus Diploma, 62% lulus S1, 7% lulus S2 dan 1% lulus S3.

Gambar 4
Demografi Responden Berdasar Tingkat Pendidikan



3.2 Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk membuktikan adanya hubungan antara religiusitas seseorang dan pengaruh lingkungan terhadap

keputusan seseorang untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Sehingga dibangun model regresi dengan variabel bebas religiusitas (RELIGIOSITY) dan pengaruh lingkungan (REFERENT GROUP) serta variabel terikat adalah kepatuhan pajak (Tax Compliance).

Sehingga diperoleh model sebagaimana berikut:

$$TC = 6.083 + 0.722REFGROUP + 0.611RELIGI$$

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa tanpa adanya faktor lain, bahwa pengaruh lingkungan dan religiusitas seseorang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Jika peluang tingkat religiusitas seseorang dinaikkan 1, maka akan berpengaruh sebesar 0.611 terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Sementara itu jika peluang pengaruh lingkungan dinaikkan 1 maka akan berpengaruh sebesar 0,722 pada kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh lingkungan apakah itu teman atau keluarga, memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan perilaku kepatuhan pajak. Ini ditunjukkan oleh koefisien positif dari kelompok referensi. Oleh karena itu kami menyimpulkan bahwa responden akan melakukan tindakan yang sama jika keluarga mereka atau teman-teman mereka juga melakukan hal yang sama pula. Hasil ini juga diungkapkan oleh Palil (2009) yang menemukan bahwa dalam kelompok referensi Malaysia, kemungkinan diaudit, persepsi pengeluaran pemerintah, hukuman, dan kendala keuangan pribadi menentukan tingkat perilaku kepatuhan pajak. Bukti serupa juga ditemukan oleh Allingham dan Sandmo (1972), Schmolder (1959), Clotfelter (1983), dan Liyana (2014) bahwa Wajib Pajak cenderung memiliki panutan yang mereka ikuti. Dengan demikian, hasil ini cocok dengan hipotesis awal bahwa kelompok referensi (pengaruh lingkungan) memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Kemudian tingkat religiusitas seseorang juga memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak. Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi cenderung akan patuh terhadap berbagai macam aturan termasuk aturan pajak. Hal ini dibuktikan oleh Torgler (2003), Riahi-Belkaoui (2004), Rajagukguk dan Sulistianti (2011), Mohd Ali (2013), dan Liyana (2014) yang telah mengungkapkan bahwa ada dampak positif antara religiusitas dan kepatuhan pajak. Orang yang mengaku beragama memiliki perilaku kepatuhan pajak yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Oleh karena itu religiusitas memiliki dampak signifikan positif pada perilaku kepatuhan pajak.

Berdasarkan hasil tersebut, DJP harus melihat peluang untuk bekerjasama dengan beberapa pihak baik itu komunitas maupun tokoh agama. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh DJP antara lain 1) Meningkatkan kerjasama dengan tokoh-tokoh agama dengan Malukan inklusi kesadaran pajak dalam Pendidikan yang dimiliki oleh organisasi-organisasi keagamaan, 2) Mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan baik di

internal maupun eksternal DJP untuk dapat mendukung perilaku religious yang tetap mengedepankan cinta tanah air, 3) Bekerjasama dengan komunitas-komunitas baik komunitas hobby maupun komunitas kemanusiaan untuk memastikan adanya edukasi perpajakan yang memadai, dan 4) Melakukan penyuluhan aturan perpajakan baik itu melalui berbagai macam kanal terutama kanal-kanal digital yang menjangkau komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. diseminasi atau penyuluhan tentang aturan perpajakan secara massif dan terstruktur.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya hubungan yang positif antara religiusitas dan pengaruh lingkungan (kelompok) terhadap kepatuhan pajak. Untuk itu DJP perlu melihat ini sebagai peluang untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berkaitan dengan religiusitas, maka DJP perlu turut serta menjemput bola dengan bekerjasama dengan tokoh-tokoh agama untuk tetap memberikan diseminasi mengenai perpajakan sebagai bagian dari cinta tanah air. Selain itu perlunya materi perpajakan masuk ke dalam kurikulum sekolah organisasi-organisasi keagamaan seperti sekolah Muhammadiyah, sekolah NU maupun sekolah katolik patut untuk dicoba dilakukan. Selain itu DJP juga perlu untuk mendukung semangat religiusitas baik pegawai maupun Wajib Pajak dengan menyediakan tempat-tempat ibadah atau memberi kesempatan untuk melakukan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan religiusitas baik pegawai maupun Wajib Pajak.

Berkaitan dengan pengaruh lingkungan atau kelompok yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak, maka DJP perlu bekerjasama dengan komunitas-komunitas baik komunitas sosial, politik maupun hobi untuk senantiasa menyuarakan manfaat positif mengenai perpajakan sehingga masyarakat yang ikut tergabung dalam komunitas tersebut dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Selain itu diseminasi aturan perpajakan tetap harus dilakukan untuk mendorong masyarakat agar mengetahui aturan sehingga kepatuhan sukarela dapat tercapai.

5. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Namun masih banyak yang perlu diperbaiki diantaranya adalah perlunya penelitian yang baru yang mencakup jumlah responden yang mampu untuk mewakili seluruh Wajib Pajak di Indonesia sehingga kesimpulan akan dapat mewakili seluruh Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Alingham, Michael G., and Agnar Sandmo,. (1972) Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*. Vol.1 (May): pp.323-338. Amsterdam: North-Holland Publishing Company. Netherland.
- Brown, R.E., and MJ Mazur. (2003) IRS's Comprehensive Approach to Compliance. *Paper presented at National Tax Association Spring Symposium in May 2003*, Washington D.C.USA.
- Clotfelter, Charles T. (1983) Tax Evasion and Tax Rates: An Analysis of Individual Returns. *The Review of Economics and Statistics*. Vol. 65, No. 3 (Augustus): pp.363-373. Massachusetts: The MIT Press. USA.
- Elster, Jon. (1989) Social Norms and Economic Theory. *The Journal of Economic Perspectives*. Vol.3 No.4: pp.99-117. Pittsburgh: American Economic Association. USA.
- Liyana, Nur Farida. "SEJAUH MANA PENGARUH PEMERIKSAAN DAN DENDA PAJAK TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN PEMBAYAR PAJAK?." *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Journal)* 2.1 (2019): 85-94.
- Liyana, Nur Farida. (2014) *Tax Knowledge and Tax Compliance Behavior in Indonesia: The Case of Surabaya City*. MPP Thesis.Tokyo:Hitotsubashi University, Japan.
- Mohd Ali, Nor Raihana. (2013) *The Influence of Religiosity on Tax Compliance in Malaysia*. PhD Thesis. Perth: Curtin University, Australia.
- Palil, Mohd Rizal. (2009) *Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants In Self-Assessment System In Malaysia*. PhD thesis Department Of Accounting And Finance Birmingham Business School. Birmingham: The University Of Birmingham.UK.
- Rajagukguk, Sondang M., and Fitri Sulistianti. (2011) *Religiosity Over Law and Tax Compliance*. Prosiding Seminar Nasional "Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)". Jakarta. Indonesia.
- Riahi-Belkaoui, Ahmed. (2004) Relationship between tax compliance internationally and selected determinants of tax morale. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*. Vol.13: pp.135-143. Massachusetts: Elsevier, Inc. USA.
- Schmolders, G. (1959) Fiscal Psychology: A New Branch of Public Finance. *National Tax Journal*. Vo 12, No. 4 (December): pp.340-345. Washington D.C: National Tax Association. USA.
- www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf

Lampiran 1. Pertanyaan untuk Mengukur Kepatuhan Pajak

1. Dalam lima tahun terakhir, Bu Linda telah menyatakan penghasilannya akurat berdasarkan pendapatan aktual nya. Namun, karena dia belum diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak selama lima tahun terakhir, dalam penilaian tahun 2013, ia tidak melaporkan sebagian pendapatannya Dengan melakukan hal tersebut ia mendapatkan untung Rp500.000, - dari pajak yang terhutang.
2. Pak Amin adalah seorang manajer bank dan sampai sekarang selalu menjadi pembayar pajak yang jujur. Dia membayar pajak setiap tahun. Baru-baru ini, ia melihat bahwa pemerintah menghabiskan banyak dana untuk pejabat tinggi negara, membeli pesawat pribadi baru bagi Presiden dan telah meningkatkan tunjangan bagi anggota DPR. Sementara itu, pemerintah mengusulkan untuk meningkatkan tarif listrik dan gas elpiji.
3. Ibu Maria adalah seorang guru sekolah dan telah membayar pajak selama lebih dari sepuluh tahun. Rekan kerja nya, Ibu Lina, mengajar di pagi hari, tetapi mempunyai sebuah pusat perawatan bayi di rumah tanpa lisensi dari pemerintah selama hampir lima tahun dan tidak pernah membayar pajak atas penghasilan ini. Dari pengamatan Ibu Maria, Ibu Lina bertambah kekayaannya karena tambahan dari penghasilan yang tidak kena pajak tersebut . Menyadari situasi ini Ibu Maria sedang mempertimbangkan untuk tidak melaporkan seluruh pendapatannya pada tahun ini.
4. Pak Andi adalah seorang sales eksekutif yang menerima gaji pokok dan komisi atas kinerja penjualannya. Komisi dibayar secara tunai dan tidak muncul pada lembar gaji. Dia tidak pernah menyatakan pendapatan komisi dalam SPT-nya setiap tahun. Dalam tahun pajak 2013 DJP memeriksanya dan menemukan SPT Tahunannya Kurang Bayar sebesar Rp 500.000, atas hal tersebut Pak Andi diwajibkan untuk membayar kekurangan pajak ditambah dengan 2% per bulan (Rp 100.000) .
5. Nona Lydia memiliki penghasilan yang sangat tinggi dan tinggal di sebuah kondominium kelas atas di pusat kota. Baru-baru ini, perusahaan tempat dia bekerja berada dalam kesulitan dan memotong 10% gaji. Hal ini sangat mempengaruhi posisi keuangan Nona Lydia. Dalam lima tahun terakhir, ia dengan mudah membayar Rp.10.000.000 sampai dengan Rp15, 000.000 untuk pajak penghasilan tahunan. Namun dalam tahun pajak 2012, karena kendala uang, dia mengurangi penghasilannya sehingga dia tidak membayar pajak. Dengan melakukan hal ini dia bisa mengkompensasi penurunan gaji yang dia alami sepanjang tahun dengan pengurangan pajak.
6. Pak Danny sebelumnya merupakan Wajib Pajak yang baik. Dia tidak pernah mengurangi pajak dan membayar pajak tepat waktu. Dalam dua tahun terakhir, harga BBM, tarif listrik dan air, biaya tol naik. Untungnya tarif pajak penghasilan tetap sama. Karena kenaikan ini, Pak Danny sedang mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah pajak yang dia bayarkan dalam SPT Tahunan untuk tahun pajak 2013 sehingga dia melakukan penghematan sebagai kompensasi kenaikan harga.
7. Nona Putri memiliki banyak teman. Banyak keputusan-nya dipengaruhi oleh teman-teman dan kerabatnya. Dalam tahun pajak 2012, penghasilan kena pajak nya Rp 30.000.000 yang melebihi dasar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu Rp 15.840.000 dengan demikian dia diharuskan untuk membayar pajak. Namun dikarenakan teman-teman kantornya melaporkan SPT Tahunan dengan menuliskan penghasilan hanya Rp 15.840.000 dan mereka tidak dikenakan pajak, Putri berencana untuk melakukan hal yang sama

8. Pak Albert pelaku bisnis dalam bidang jual beli peralatan bangunan. Pada bulan April 2013, ia Lebih Bayar Pajak Rp1.000.000. Karena kendala keuangan, dia mencoba untuk mendapatkan kembali uang tersebut namun prosesnya sangat panjang dan berliku. Bahkan melalui proses pemeriksaan. Dia sangat frustrasi dan sedang mempertimbangkan untuk mengurangi pembayaran pajak bulan berikutnya.

Lampiran 2. Hasil Output SPSS

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	RELIGI, REFGROUP	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: TCHQ

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.615 ^a	.378	.374	3.896

a. Predictors: (Constant), RELIGI, REFGROUP

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2740.138	2	1370.069	90.277	.000 ^a
	Residual	4507.365	297	15.176		
	Total	7247.503	299			

a. Predictors: (Constant), RELIGI, REFGROUP

b. Dependent Variable: TCHQ

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.083	1.912		3.181	.002
	REFGROUP	.722	.063	.532	11.543	.000
	RELIGI	.611	.110	.256	5.551	.000

a. Dependent Variable: TCHQ